

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL

NOMOR : SK.50/V-UPR/2004

TANGGAL : 14 April 2004

PEDOMAN PEMBANGUNAN MODEL ANEKA USAHA KEHUTANAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 69 dan 70 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan menjaga hutan dari gangguan perusakan, berperan aktif dalam rehabilitasi dan konservasi, turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan. Sementara Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian petani merupakan masyarakat yang terkait langsung dengan berbagai upaya dalam rangka penyelamatan maupun pemanfaatan hutan, sehingga hutan tersebut dapat lestari dan berkesinambungan.

Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan yang merupakan bagian dari pembangunan perhutanan rakyat merupakan usaha dalam bidang kehutanan dengan basis hutan dan lahan dengan hasil hutan bukan kayu. Pengelolaannya berorientasi pada peningkatan produktivitas dengan memperhatikan tiga azas yaitu ekonomi, social, dan ekologi.

Dalam usaha pengembangan Aneka Usaha Kehutanan, pada prinsipnya dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani. Pemerintah melakukan pembinaan melalui regulasi, supervisi dan fasilitasi, yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur baik fisik maupun social

(kelembagaan masyarakat). Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumberdaya alam, teknologi, dan modal.

Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dilaksanakan dengan pola agroforestry dan diarahkan pada pengembangan komoditi hasil hutan bukan kayu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang tinggi sehingga peluang pengembangannya sangat besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan devisa negara.

Komoditi Aneka Usaha Kehutanan yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain buah-buahan, getah-getahan dan resin, tanaman obat, tanaman pangan, biji-bijian dan minyak atsiri. Berbagai jenis tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia bahkan dapat dijadikan komoditi yang mempunyai nilai ekonomis.

Jenis komoditi hasil hutan bukan kayu sangat banyak dan beragam dimana masing-masing komoditi mempunyai sifat dan karakteristik masing-masing seperti tempat tumbuh, teknik budidaya, penanganan pasca panen, manfaat dan kegunaan serta nilai ekonominya. Sehingga dalam pengembangan usaha komoditas-komoditas aneka usaha kehutanan tersebut diperlukan ada prioritas sesuai dengan kondisi setempat.

Salah satu kegiatan bidang RLPS dalam rangka melaksanakan tugas sesuai kewenangan Pemerintah adalah membangun model AUK, dalam luasan yang kecil namun semaksimal mungkin mampu mengakomodir kebutuhan obyektif pengelolaan aneka usaha kehutanan secara lestari yang mencakup aspek biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan.

Melalui pembangunan model aneka usaha kehutanan, diharapkan dihasilkan kriteria, standar dan pedoman pengelolaan AUK yang sesuai dengan kondisi setempat. Dari hasil pembangunan model tersebut

diharapkan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dapat menyusun kebijakan dan kegiatan yang tepat untuk memperoleh manfaat ganda berupa pelestarian komoditi AUK itu sendiri dan peningkatan pendapatan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Pembangunan Model Aneka Usaha Kehutanan adalah untuk memberikan arahan dan acuan bagi para pihak dalam mengembangkan model aneka usaha kehutanan.

Tujuannya adalah agar pelaksanaan pembangunan model aneka usaha kehutanan dapat terselenggara sesuai dengan persyaratan, kemampuan dan kondisi setempat secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pembuatan Pedoman ini meliputi :

1. Pengembangan jenis-jenis komoditi aneka usaha kehutanan
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Pengembangan Kelembagaan Usaha
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Peran serta Para Pihak

D. Konsep Dasar Model Aneka Usaha Kehutanan

Pembangunan Model Aneka Usaha Kehutanan adalah salah satu Program Pengembangan Usaha Perhutanan Rakyat, sehingga diperoleh berkembangnya usaha kelompok masyarakat dalam skala kecil dan menengah berbasis hutan baik pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan/lahan milik. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan diarahkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga

petani secara bertahap akan mampu mengelola hutan secara mandiri dan berkelanjutan yang berazaskan pada keseimbangan lingkungan (ekologi), sosial budaya dan ekonomi.

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengaturan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagian urusan kehutanan antara lain pengembangan usaha perhutanan rakyat termasuk pengembangan aneka usaha kehutanan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peran Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutanan dalam pengembangan aneka usaha kehutanan adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada pemerintah Kabupaten/Kota antara lain dengan cara memberikan kriteria dan standar teknis dan pengembangan kelembagaan. Kriteria dan standar tersebut sudah barang tentu akan berbeda dari satu kabupaten dengan kabupaten lainnya tergantung kondisi biofisik, sosekbud masing-masing daerah. Untuk memperoleh data empiris dalam perumusan rekomendasi serta kriteria dan standar pengembangan aneka usaha kehutanan yang sesuai dengan kondisi setempat.

Pembangunan Model Aneka Usaha Kehutanan dalam skala kecil namun semaksimal mungkin mampu mengakomodir pengelolaan hutan yang lestari, efektif dan efisien.

Model yang dibangun harus layak usaha atau harus menguntungkan secara finansial oleh sebab itu penetapan luas model harus memperhitungkan kelayakan usaha tersebut.

Hal yang juga perlu mendapat perhatian dalam pembangunan model aneka usaha kehutanan adalah bahwa pembangunan model tidak harus dimulai dari pembuatan tanaman, tetapi dapat juga mengembangkan

lokasi-lokasi hutan yang sudah terdapat potensi komoditi AUK namun kelembagaan usahanya belum berkembang.

Pembangunan model aneka usaha kehutanan tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan biofisik dan sosial ekonomi pada masing-masing Kabupaten, khususnya terhadap perkembangan teknologi, sosial dan ekonomi yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kriteria dan standar teknis dalam pembangunan aneka usaha kehutanan tersebut. Dalam model aneka usaha kehutanan tersebut juga dilengkapi dengan model pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok, sehingga dari model tersebut akan berkembang menjadi unit usaha yang mandiri dan berkelanjutan.

Pembinaan selanjutnya dari model tersebut serta pengembangan pada lokasi lain yang potensial dilakukan sepenuhnya oleh Dinas yang menangani Kehutanan di Kabupaten yang bersangkutan.

E. Pengertian

1. Perhutanan rakyat adalah usaha dibidang kehutanan berbasis hutan dan lahan dengan hasil kayu dan bukan kayu yang pengelolaannya diutamakan pada pengembangan ekonomi rakyat dengan memperhatikan aspek social, budaya dan penyelamatan lingkungan.
2. Kelompok tani adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.
3. Pemberdayaan kelompok tani adalah upaya meningkatkan kemampuan kelompok tani dan kelembagaannya supaya mandiri

melalui peningkatan akses terhadap sumberdaya, permodalan, teknologi dan pasar.

4. Pendampingan adalah upaya membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kelembagaannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan cara mendampingi pihak-pihak yang berkompeten.
5. Usaha Kelompok tani adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tani dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.
6. Aneka Usaha Kehutanan adalah kegiatan usaha dibidang kehutanan yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.
7. Hutan Cadangan Pangan adalah hutan yang kaya berbagai jenis tumbuhan atau tanaman sumber bahan alternatif berupa pohon yang merupakan sumber karbohidrat dan protein yang merupakan hasil kegiatan optimalisasi hutan.
8. Tanaman Obat adalah hasil hutan nabati berupa tanaman atau tumbuhan yang mempunyai khasiat sebagai obat yang merupakan hasil optimalisasi ruang tumbuh hutan.
9. Tanaman Penghasil Minyak Atsiri adalah hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan dari jaringan tanaman tertentu seperti akar, batang, kulit, daun, bunga, buah, atau biji dan mempunyai sifat mudah menguap pada suhu kamar, mempunyai rasa getir, berbau wangi sesuai dengan aroma tanaman yang diperoleh dengan cara penyulingan, pemerasan atau ekstraksi.
10. Buah dan biji adalah hasil hutan bukan kayu berupa buah dan biji atau bagian dari buah dan biji sebagai bahan industri.
11. Getah adalah hasil hutan bukan kayu yang merupakan bahan ekstraktif berupa hasil sadapan, kulit kayu, minyak atsiri dan hasil lainnya.
12. Tanaman Bawah Tegakan adalah tanaman di bawah tegakan hutan berupa tanaman perdu dan umbi-umbian.

13. Areal Model adalah wilayah/lokasi yang digunakan untuk suatu kegiatan yang dirancang untuk memilih alternatif yang akan dikembangkan lebih lanjut.
14. Areal Dampak adalah wilayah yang terpengaruhi oleh pembangunan model pengembangan dari suatu kegiatan.

BAB II

JENIS-JENIS KOMODITI ANEKA USAHA KEHUTANAN DAN POLA PENGEMBANGAN

A. Jenis Komoditi

Komoditi Aneka Usaha Kehutanan (AUK) yang potensial untuk dikembangkan adalah Tanaman Pangan (Hutan Cadangan Pangan), Tanaman Obat (Pemanfaatan lahan dibawah Tegakan Hutan), Tanaman Kehutanan Penghasil Buah dan Biji, Tanaman Penghasil Getah-getahan dan Resin, Tanaman Penghasil Minyak Atsiri.

1. Hutan Cadangan Pangan (HCP)

Jenis tanaman yang dapat dikembangkan sebagai sumber pangan adalah :

- Jenis umbi-umbian
 - Garut (*Maranta arundinacea L*)
 - Gadung (*Dioscorea hispida Dennst*)
 - Ganyong (*Canna edulis*)
 - Iles-iles (*Amorphopallus variabilis*)
 - Uwi (*Discorea bulbifera*)
 - dan lain-lain
- Jenis pohon-pohonan
 - Sukun (*Artocarpus altilis*)
 - Sagu (*Metorxylon Spp*)
 - Aren (*Arenga piñata*)
 - dan lain-lain

2. Tanaman Obat

Jenis tanaman yang diprioritaskan untuk dikembangkan adalah :

- Tanaman bawah tegakan atau empon-empon
 - Jahe (*Zingiber officinale*)
 - Kencur (*Kaempferia galanga*)
 - Kapulaga (*Ammun cardamomum Wild*)

- Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*)
- Kunyit (*Curcuma domestica*)
- dan lain-lain
- Jenis tanaman tahunan
 - Mimba (*Azadirachta indica*)
 - Kedawung (*Parkia biglobosa*)
 - Pasak bumi (*Eurycoma longifolia*)
 - Kayu kuning (*Arcangelisia flava*)
 - Saluang bilum (*Luvunga eleutheranda*)
 - Kayu sapang (*Caesalpinia sappan*)
 - Tabat barito (*Ficus deltoidea*)
 - dan lain-lain

3. Tanaman Kehutanan Penghasil Buah dan Biji

Jenis tanaman yang dikembangkan adalah tanaman hutan penghasil buah non pangan yaitu :

- Tengkawang (*Shorea Sp*)
- Kemiri (*Aleurites moluccana Wild*)
- Pinang (*Area catechu L*)
- Saga (*Abrus sp*)
- Jarak (*Ricinus communis*)

4. Tanaman Penghasil Getah-getahan dan Resin

Jenis tanaman yang dikembangkan adalah pohon penghasil getah-getahan antara lain :

- Gaharu

Jenis tanaman yang menghasilkan gubal gaharu sebagai berikut :

a. *Thymelaeceae*

- *Aquilaria hirta*
- *A. malaccensis*
- *Aetoxylon sympelatum*
- *Enkleia malaccensis*
- *Gonystylus bancanus*

- *G. macrophyllus*
- *Wikstroemia androsaemifolia*
- *W. polyantha*
- *W. tenuiramis*
- b. *Leguminosae*
 - *Dalbergia parviflora*
- c. *Euphorbiaceae*
 - *Excocaria agalocha*
- Tusam (*Pinus merkusii*)
- Damar (*Shorea javanica*)
- Jelutung (*Dyera polyphytta*)
- Seed Lak (*Laccifer lacca Kerr*)
- Kemenyan (*Styrax bonzoin*)

5. Tanaman Penghasil Minyak Atsiri

Jenis tanaman penghasil minyak atsiri yang dapat dikembangkan adalah :

- Nilam (*Pogostemon sp*)
- Kenanga (*Canangium odoratum Var. macrophylla*)
- Cendana (*Santalum album Linn*)
- Kayu Putih (*Melaleuca leucadendron Linn*)

B. Pola Penanaman Komoditi AUK

1. Agroforestry

Merupakan suatu sistem pengelolaan lahan berazaskan kelestarian yang meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan dengan mengkombinasikan produksi tanaman pertanian (termasuk tanaman pohon-pohonan) dengan tanaman hutan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama.

Terdapat beberapa sistem agroforestry yang dapat diterapkan dalam pengembangan komoditi AUK antara lain :

a. Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan Hutan

Adalah kegiatan tanam menanam tumbuhan dibawah tegakan hutan dengan jenis tanaman produktif tertentu yang bertujuan memperkaya atau meningkatkan nilai hutan secara ekonomis dan ekologis sehingga berfungsi sebagai tumpangsari, kondisi lahan hutan yang dipergunakan untuk kegiatan ini adalah :

- Lahan hutan dengan kondisi tegakan memiliki ruang tumbuh optimal untuk ditanami jenis tanaman bawah produktif.
- Tanah cukup subur
- Kemiringan lahan maksimum 40% atau dapat diolah untuk penanaman tanaman bawah dan tidak menyebabkan erosi.

Jenis tanaman yang dipilih memperhatikan hal sebagai berikut :

- Tahan naungan
- Kesesuaian agroklimat
- Keterkaitan antar jenis untuk menciptakan system usaha tani yang berkelanjutan.
- Berpotensi produksi cukup baik dan bernilai ekonomis.

Beberapa jenis yang dapat dikembangkan dibawah tegakan hutan antara lain :

- Tanaman Obat/rempah/empon-empon
- Tanaman Pangan berupa umbi-umbian dan tanaman semusim lainnya (jagung, padi-padian dan kacang-kacangan).
- Tanaman Penghasil Minyak Atsiri

b. Sistem Campuran

Pada pola ini tanaman komoditi AUK ditanam secara bersamaan dengan jenis tanaman kayu-kayuan sehingga nantinya diharapkan akan membentuk suatu sistem hutan dengan strata yang berlapis-lapis. Pola ini dapat dilaksanakan di dalam kegiatan rehabilitasi hutan atau pada kegiatan hutan rakyat.

Beberapa jenis komoditi AUK yang dapat dikembangkan dengan pola ini adalah dari :

- Tanaman obat berupa pohon seperti mimba, kedaung, mengkudu dan lain-lain.
- Tanaman penghasil getah/resin seperti damar, kemenyan, elutung dan lain-lain.
- Jenis tanaman minyak atsiri seperti kenanga, kayu putih, pala dan lain-lain.

2. Monokultur

Adalah penanaman 1 (satu) jenis komoditi AUK dalam satu areal. Jenis yang dipilih adalah jenis-jenis yang pada awal pertumbuhan tidak memerlukan naungan seperti jelutung, tanaman minyak atsiri seperti pinang, kemiri, dan lain-lain. Pengembangan komoditi AUK dengan pola monokultur dapat dilakukan pada lahan milik berupa hutan rakyat atau pada kawasan hutan negara berupa hutan tanaman.

3. Pengkayaan Tanaman

Pada pola ini pengembangan komoditi AUK dilakukan melalui kegiatan pengkayaan tanaman pada hutan baik hutan rakyat, areal reboisasi, hutan produksi maupun hutan lindung yang kondisi tanamannya jarang. Dalam hal ini yang dilakukan adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan yang tersedia. Jenis komoditi AUK yang dapat dikembangkan dengan pola ini adalah jenis-jenis tanaman hutan (pohon) yang pada masa pertumbuhan awalnya memerlukan naungan seperti kemenyan, damar, gaharu dan lain-lain.

BAB III

PERENCANAAN

A. Persiapan

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi terkait.
Upaya Perhutanan Rakyat dalam rangka Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan bersifat lintas Sektor dan melibatkan berbagai aspek fisik, sosial-ekonomis dan kelembagaan. Oleh karena itu koordinasi diantara instansi pemerintah yang berkaitan dan antara instansi pemerintah dengan lembaga swasta dan lembaga masyarakat sangat diperlukan. Koordinasi harus mencakup dalam Penyusunan Rencana, Program dan Pelaksanaan, Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi hasil kegiatan.

2. Sosialisasi pada masyarakat sasaran lokasi.
Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi dan persamaan persepsi tentang Pembangunan Model Aneka Usaha Kehutanan kepada masyarakat/petani penggarap terutama upaya penerapan teknis-teknis tanaman dan peningkatan produksi. Kegiatan sosialisasi dapat diwujudkan dalam bentuk pertemuan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun propinsi.

3. Sosialisasi pada petugas pendamping (Penyuluh/LSM), dan lembaga yang ada di Desa.
 - a. Dapat memanfaatkan Penyuluh/LSM berperan membantu mendorong dan membimbing pembentukan kelompok tani hamparan yang menjadi sasaran lokasi model AUK merencanakan kegiatan secara partisipatif, pertemuan kelompok, dan perlombaan.
 - b. Lembaga-lembaga masyarakat (KUD).
 - LKMD berperan untuk menggerakkan masyarakat dalam kegiatan bersama meningkatkan peranserta masyarakat dalam

kegiatan yang disponsori oleh pemerintah serta meningkatkan kemampuan sendiri petani dalam pelaksanaan pembangunan dipedesaan.

- KUD berperan untuk membantu petani penggarap dan anggotanya dalam memperoleh kemudahan kredit, sarana produksi, dan alat-alat pertanian, serta menampung dan memasarkan hasil.

B. Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi model dan dampaknya dipilih dengan mempertimbangkan aspek teknis dan aspek sosial antara lain :

1. Aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam pemilihan areal model pembangunan AUK adalah sebagai berikut :

- Letak lokasi cukup strategis yaitu mudah ditinjau, mudah dilihat/dikunjungi oleh petani, berada pada bagian dari suatu hamparan lahan yang cocok untuk pengembangan dampak, serta mempunyai akses pasar.
- Merupakan lahan hutan negara/hutan rakyat tidak produktif atau pemanfaatan hutan/lahan belum optimal serta secara teknis cocok untuk pengembangan AUK.
- Merupakan daerah produksi AUK tetapi teknik budidayanya belum dikuasai atau perlu dikembangkan teknologinya.
- Sedapat mungkin Terletak di dalam areal mikro DAS yang ditetapkan.

2. Aspek Sosial Ekonomi

Aspek sosial ekonomi dalam pemilihan lokasi areal model antara lain :

- Merupakan daerah yang tingkat pendapatan masyarakatnya masih relatif rendah.

- Merupakan suatu daerah yang tingkat pengetahuan dan keterampilannya masih relatif rendah khususnya AUK.
- Merupakan suatu daerah yang masyarakatnya sudah mengenal tentang AUK dan manfaatnya, serta mempunyai keinginan untuk mengembangkan hal tersebut.
- Merupakan daerah potensi AUK yang mempunyai pasar baik namun belum dikembangkan.

C. Identifikasi dan Inventarisasi

Pengembangan aneka usaha kehutanan didasarkan kepada potensi lokal dan tuntutan/aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian identifikasi dan inventarisasi yang perlu dilakukan meliputi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana produksi, pasar, kelembagaan dan permodalan.

1. Identifikasi Sumberdaya Alam (SDA)

Melakukan observasi dan wawancara dengan petani tentang potensi SDA komoditi AUK yang potensi untuk dikembangkan oleh petani sebagai usaha yang ekonomis, antara lain potensi pemanfaatan hutan dan lahan, potensi vegetasi, dan potensi sarana dan prasarana produksi yang tersedia.

2. Identifikasi dan Inventarisasi Sumberdaya Manusia (SDM)

Melakukan wawancara dengan anggota keluarga petani untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi sosial ekonomi, persepsi, aspirasi dan beberapa aspek kehidupan mereka yang digunakan sebagai bahan perencanaan dan pembinaan.

3. Identifikasi dan Inventarisasi Teknologi dan Pasar

Melakukan observasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat untuk mengetahui teknologi yang tersedia di masyarakat terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi, sistem produksi, penanganan pasca panen, pasar dan lain-lain.

4. Identifikasi Kelembagaan dan Permodalan

Melakukan observasi pada masyarakat untuk mengetahui bentuk-bentuk kelembagaan sosial dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat terutama yang berhubungan dengan usaha perekonomian di desa.

5. Identifikasi Kemitraan

Melakukan observasi dan identifikasi bentuk-bentuk kemitraan yang ada dan berkembang di masyarakat.

D. Pengolahan Data dan Pembuatan Peta

1. Pengolahan Data

Data yang telah terhimpun berupa data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisa dengan mempergunakan metode sebagai berikut :

- **Analisa Kebutuhan**
Kebutuhan bahan, biaya dan tenaga kerja dihitung dengan berdasarkan standar yang berlaku di daerah untuk setiap jenis pekerjaan.
- **Analisa Fisik**
Data biofisik dari hasil survey dianalisa dengan cara mencari hubungan antar faktor-faktor alam (faktor yang tidak dapat dirubah misalnya kondisi iklim dan sebagainya), dengan faktor-faktor yang disebabkan oleh perlakuan manusia misalnya dalam pemanfaatan lahan, cara bercocok tanam dan sebagainya, sehingga dari analisa tersebut diperoleh calon lokasi, jenis komoditi, alternatif jenis perlakuan yang sesuai dengan kondisi lahan, serta teknik budidaya.
- **Analisa Ekonomi**
Untuk memperhitungkan besarnya modal/investasi, perkiraan laba dan rugi dalam suatu kegiatan AUK perlu dilakukan analisa ekonomi. Analisa ekonomi untuk data-data yang telah diseleksi tersebut mempergunakan rumus-rumus perhitungan Benefit dan Cost Ratio (B/C Ratio), Internal Rate dan Return (IRR) dan Net

Present Value (NPV). Disamping itu juga dianalisa tentang hubungan dan pengaruh dari kondisi fisik dan sosial masyarakat terhadap kegiatan AUK yang akan dilaksanakan. Dengan hasil analisa ini dapat dipilih salah satu alternatif yang menguntungkan dalam pelaksanaan aktivitas AUK.

2. Pembuatan Peta

Lokasi areal model dituangkan dalam peta lokasi dan peta situasi.

Peta lokasi memuat sekurang-kurangnya menggambarkan letak dan luas lokasi. Sedangkan peta situasi memuat :

- Pembagian pemilikan/penggarapan lahan
- Topografi
- Pola tanam
- Jalan dan sungai
- Bangunan konservasi tanah

Peta situasi di buat dengan skala 1 : 10.000 sehingga dapat digunakan sebagai peta kerja.

Pembuatan peta dapat dilakukan secara manual/digital dengan memperhatikan kaidah dan ketentuan pembuatan peta. Sebuah peta sekurang-kurangnya memuat :

1. Skala peta
2. Informasi tepi yang terdiri dari :
 - Judul peta
 - Legenda/keterangan
 - Sumber data
 - Arah
 - Angka Koordinat Geografi

E. Penyusunan Naskah Rancangan

Berdasarkan analisa-analisa tersebut diatas, maka secara musyawarah dengan masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait maka dipilih

dan ditetapkan komoditi yang dikembangkan, lokasi dan petani peserta areal model.

Luas lokasi dapat bervariasi sesuai dengan kelayakan usaha (10-25 ha) per unit model.

1. Teknis Penyusunan Naskah Rancangan

Naskah rancangan disusun dalam bentuk buku yang dijilid dengan baik.

Format rancangan memuat :

1.1. Judul Buku

1.2. Kerangka Isi

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

II. RISALAH UMUM

A. Fisik

1. Letak dan Luas Lokasi

2. Kondisi Lokasi

3. Pola Penggunaan Lahan

4. Tanah

5. Topografi

6. Iklim

B. Sosial Ekonomi dan Budaya dan Kelembagaan Masyarakat

1. Kependudukan

2. Mata Pencaharian

3. Pendidikan

4. Kelembagaan

5. Sosial Budaya Masyarakat

III. RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN MODEL

- A. Lokasi dan Luas Areal Model
- B. Jenis dan Volume Kegiatan
- C. Jenis dan Daur Tanaman
- D. Persiapan Lapangan
- E. Pembangunan Tanaman
- F. Pemanenan dan Pasca Panen

IV. RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA

- A. Pengembangan Kelompok Tani
- B. Penyuluhan dan Pendampingan
- C. Pelatihan
- D. Pengembangan Usaha
- E. Peningkatan Daya Saing

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN

- A. Rencana Biaya
- B. Rencana Pendapatan
- C. B/C Ratio, IRR dan NPV

VI. TATA WAKTU

LAMPIRAN – LAMPIRAN

2. Legalisasi Rancangan

Rancangan pembangunan model aneka usaha kehutanan sepenuhnya dibuat oleh Balai Pengelolaan DAS dengan penyusun, penilai dan pengesah sebagai berikut :

- a. Penyusun Rancangan : Tim Penyusun Rancangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai PDAS.
- b. Penilai Rancangan : Kepala Seksi Perencanaan pada Balai Pengelolaan DAS
- c. Pengesahan Rancangan : Kepala Balai Pengelolaan DAS

BAB IV PELAKSANAAN

A. Persiapan Lapangan

Model bertujuan usaha, maka yang dijadikan sasaran lokasi adalah lahan yang masih cukup produktif atau lahan yang telah diprakondisikan sehingga menghasilkan produksi yang optimal dan menguntungkan.

Luasan areal model ditentukan berdasarkan kemampuan pengelolaan usaha oleh kelompok tani dengan satuan terkecil yang memungkinkan untuk dikelola secara menguntungkan (manajemen usaha). Luasan terkecil dalam pengelolaan usaha ini, menjadi salah satu pengamatan pada areal model untuk dianalisa seberapa kemampuan petani atau kelompok tani mampu mengelola kegiatan usaha dan memberikan keuntungan.

Persiapan lahan sangat ditentukan oleh jenis tanaman/komoditi yang akan dikembangkan untuk jenis tanaman yang memerlukan naungan seperti kemenyan, gaharu, damar, dalam persiapan lahan dilakukan sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan diperlukan adanya pengolahan tanah dengan memperhatikan aspek konservasi tanah.

B. Penanaman

Apabila lahan sudah siap dan bibit tanaman pokok sudah tersedia maka penanaman biasa dilaksanakan secepat mungkin untuk menghindari tanaman mati atau lahan ditumbuhi tanaman lain. Jarak tanam yang tepat apabila daun-daun dari individu tanaman saling tumpang tindih sehingga menutupi ruang diantara individu tanaman. Penanaman sebaiknya ditanam pada waktu pagi hari atau sore hari hal ini untuk menghindari tanaman stress/layu bahkan mati. Untuk semua penanaman baik tanaman

pokok maupun tanaman semusim sebaiknya ditanam pada awal musim penghujan.

Bibit tanaman yang di dalam polybag/plastik harus dikeluarkan terlebih dahulu dari wadahnya sebelum bibit tanaman ditanam, sehingga pada waktu tanaman ditanam wadah/polybag/plastik tidak ikut ditanam. Bibit tanaman dari sumber bibit yang jelas seperti Areal Pembuatan Bibit, Kebun Benih dan lain-lain, sehingga bibit mempunyai kualitas yang baik.

C. Panen dan Pasca Panen

1. Panen

- a. Setiap komoditi akan sangat berbeda-beda saat panen dan teknik pemanenan.
- b. Pada komoditi tertentu, peruntukan hasil tanaman untuk konsumsi bisa tidak sama saat panen dengan hasil panen untuk bahan perbanyak tanaman/bibit.
- c. Saat panen yang bersamaan dalam skala besar, dalam posisi kelembagaan yang belum kuat, harga akan mudah di permainan oleh tengkulak.
- d. Fluktuasi harga yang tidak menentu atau saat harga turun menyebabkan tertundanya saat panen sehingga mengurangi kualitas produk.

2. Pasca Panen

- a. Identifikasi teknologi pasca panen yang telah tersedia di masyarakat serta teknologi pasca panen yang dibutuhkan untuk peningkatan nilai tambah dari suatu produksi.
- b. Penerapan dan pengembangan teknologi pasca panen
Memberikan fasilitas dalam penerapan dan pengembangan teknologi pasca panen.
- c. Penanganan pasca panen yang optimal akan meningkatkan mutu produk.
- d. Diversifikasi produk

Memfasilitasi terciptanya diversifikasi produk sesuai dengan permintaan pasar

- e. Tersedianya formasi pasar dan jaringan pemasaran
- f. Menyelenggarakan promosi produk dan pengembangan pasar
- g. Mengembangkan pola distribusi produk
- h. Mengembangkan kemitraan pemasaran produk

BAB V

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA

A. Pengembangan Kelompok Tani

Pengembangan Kelembagaan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kelompok tani yang tangguh dan dinamis dengan manajemen yang memadai dalam bidang atau unit usaha yang menguntungkan anggotanya. Dengan upaya pengembangan kelembagaan yang dilakukan, diharapkan dalam beberapa tahun kedepan dapat tumbuh lembaga-lembaga/kelompok bisnis/komersial di pedesaan dengan berbagai bidang usaha mulai dari hulu sampai hilir dalam system agribisnis.

Kelembagaan kelompok tani dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Bimbingan manajemen usaha, melalui dari perencanaan usaha, permodalan, manajemen produksi, pengolahan sampai pemasaran hasil, yang meliputi bimbingan-bimbingan :

- Penyusunan usaha bersama
- Penyusunan RDKK
- Cara mendapatkan modal
- Bimbingan pemasaran
- Manajemen simpan pinjam
- Manajemen perkreditan
- Kewirausahaan
- Manajemen partisipatif
- Magang manajemen usaha

Bimbingan-bimbingan tersebut diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan dan tingkatan kelompok tani.

2. Bimbingan teknis mulai dari budidaya, penanganan dan pengolahan hasil, pemanfaatan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi.

3. Bimbingan kelembagaan mulai dari administrasi kelompok, kerjasama dalam kelompok, kerjasama antar kelompok dan kemitraan usaha.

B. Penyuluhan dan Pendampingan

Penyuluhan dan Pendampingan dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan DAS dibantu oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan atau LSM yang bergerak di bidang yang sama, untuk memberikan bimbingan teknis kepada petani dan kelompok tani dalam pembuatan areal model, agar dalam pelaksanaannya benar-benar menerapkan rancangan teknis areal model yang telah disusun. LSM bertanggung jawab memberikan pendampingan perencanaan dan pelaksanaan usaha dan kelembagaan kepada petani dan kelompok tani. Penyuluhan cukup penting diberikan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknis, usaha dan kelembagaan yang berkelanjutan.

C. Pelatihan

Pelatihan petani diberikan dalam bentuk pelatihan teknis, manajemen dan kewirausahaan yang didasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan latihan dan identifikasi masalah dilapangan.

Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan kewirausahaan secara baik. Fasilitasi pelatihan tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen kewirausahaan kelompok tani dengan baik. Materi pelatihan yang diberikan, disesuaikan dengan kemampuan kelompok tani.

D. Pengembangan Usaha

Pengembangan kelembagaan usaha AUK pada dasarnya adalah upaya membangun dan memperkuat sistem usaha agar kelompok tani dan anggotanya secara bertahap diarahkan untuk mampu dan mandiri dalam melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan.

Pengembangan kelembagaan usaha dilaksanakan antara lain melalui kegiatan :

1. Penguatan Modal

Penguatan modal kelompok dapat dilakukan dengan pemberian bantuan bergulir atau kredit. Dengan demikian petani tidak hanya memperoleh modal dengan cumac-Cuma, namun mereka harus mengembalikan dalam jangka waktu dan tingkat bunga yang disepakati dengan mempertimbangkan keuntungan dan kelangsungan usahanya sesuai kondisi masing-masing kelompok. Dalam hal ini dapat juga dilakukan melalui pengadaan sarana produksi (bibit, pupuk dan peralatan pertanian). Pemanfaatan dana kelompok untuk modal kerja direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok tani dengan alternatif untuk kegiatan budidaya, penanganan pasca panen dan lain-lain. Untuk pengadministrasian dana kelompok tani, terlebih dahulu harus disepakati mekanisme yang diterapkan untuk menghimpun dana pengembalian atau pengelola dana tersebut. Dana kelompok tani yang berasal dari pengembalian petani disimpan dalam rekening kelompok tani yang bersangkutan, yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dan prosedur yang disepakati.

2. Pengembangan Usaha Kelompok

Berbagai bidang usaha khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan kelompok dan masyarakat sekitar perlu dikembangkan untuk membuka peluang kerja dan menambah pendapatan kelompok. Penentuan bidang usaha yang akan dikembangkan perlu dibahas dan dimusyawarahkan diantara anggota kelompok dengan bimbingan dari pendamping dan penyuluh.

Bidang usaha yang dapat dikembangkan antara lain usaha penanganan pasca panen, kios saprodi, usaha jasa dan lain-lain.

3. Pengembangan Kemitraan

Yang perlu diperhatikan bahwa kemitraan usaha bukan hanya sekedar kerjasama, melainkan membangun kemitraan usaha yang sehat dengan dorongan tanggungjawab dan panggilan moral dengan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, menguntungkan dan dapat menciptakan pengembangan aneka usaha kehutanan yang sehat dan tangguh yang mampu naik kelas menjadi sektor ekonomi skala besar. Petani pada umumnya hanya memiliki aset sumberdaya alam. Untuk pembangunan usaha dibutuhkan seperti manajemen usaha, yang meliputi teknologi, dan keterampilan. Disisi lain, aset teknologi, dan aset manajemen dimiliki oleh sektor ekonomi skala yang lebih besar. Untuk menggabungkan aset-aset yang dimiliki petani dan yang dimiliki sektor ekonomi skala besar perlu adanya kerjasama antara keduanya dalam bentuk pola-pola kemitraan. Oleh sebab itu pola-pola kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak perlu diciptakan dengan dasar aset-aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut.

Peran kemitraan dalam pemasaran hasil merupakan faktor yang sangat diharapkan untuk keberhasilan pengembangan aneka usaha kehutanan. Pola kemitraan yang dikembangkan sejauh mungkin menghindari sistem ijon, oleh sebab itu kerjasama dilakukan tidak secara perorangan, namun antara kelompok tani/koperasi dengan pengusaha sehingga petani mempunyai bargaining position/kekuatan terutama dalam penetapan harga. Disamping itu dengan adanya kemitraan diharapkan ada jaminan pemasaran produk-produk yang dihasilkan.

E. Peningkatan Daya Saing

Pengembangan usaha Aneka Usaha Kehutanan tidak dapat dibangun melalui pendekatan produksi saja (supply driven). Fakta empiris telah membuktikan kegagalan pendekatan produksi (supply driven) ini. Kegagalan memasarkan produksi yang melimpah dan pemborosan-

pemborosan sumberdaya ekonomi, adalah indikator atas kegagalan pendekatan supply driven tersebut. Oleh karenanya dalam rangka efisiensi maka perlu dilakukan upaya untuk memperkuat daya saing produk disuatu daerah melalui peningkatan kompetensi lokal. Dengan peningkatan daya saing ini diharapkan produk yang dihasilkan suatu daerah dapat bersaing di pasar lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Dalam rangka efisiensi dan upaya untuk memperkuat daya saing produksi, maka kedepan, mau tidak mau harus dibangun suatu usaha melalui pendekatan system agribisnis yang efisien dan berdaya saing tinggi.

Dengan menempatkan system agribisnis dalam pembangunan usaha di bidang kehutanan, maka secara lengkap lingkup kegiatannya mencakup sub system :

1. Budidaya (Production)

Untuk meningkatkan kualitas produk perlu menentukan dan mengembangkan pola budidaya dan pola pemanfaatan hasil hutan, menetapkan jenis tanaman yang akan diusahakan sesuai dengan kondisi agroklimat serta mempunyai nilai ekonomi atau akses pasar. Disamping itu perlu menerapkan teknologi dalam silvikultur dan budidaya seperti teknik penanaman, waktu tanam yang sesuai, pengolahan lahan, pemupukan, pemeliharaan tanaman, pengkayaan, pemberantasan hama dan penyakit, serta waktu dan teknik pemanenan.

2. Pengadaan sarana produksi (Input factors)

Dalam pengembangan usaha, pengadaan sarana dan prasarana produksi antara lain penggunaan bibit unggul, penyediaan pupuk dengan jenis dan dosis yang sesuai, serta penggunaan peralatan pertanian yang sesuai baik untuk keperluan produksi maupun pengolahan pasca panen, merupakan alat dan persyaratan utama dalam sistem agribisnis untuk memenuhi kuantitas dan kualitas produksi sesuai permintaan pasar dan mempunyai daya saing yang tinggi.

3. Industri Pengolahan (Processing)

Pengolahan pasca panen merupakan sub sistem agribisnis hilir dimaksudkan untuk meningkatkan nilai dari suatu produk, dimana produk yang dihasilkan sudah tersedia dalam bentuk olahan dengan kemasan yang menarik. Disamping itu untuk memenuhi permintaan pasar/selera konsumen dan meningkatkan nilai tambah perlu juga dilakukan diversifikasi dan pengembangan produk.

Penanganan pasca panen sangat penting untuk setiap komoditi agar kualitas suatu produk dapat dijaga, akibat kesalahan penanganan pasca panen maka dapat mengurangi kualitas produk pertanian tersebut. Pengelolaan pasca panen pada setiap komoditi tidaklah selalu sama, sehingga memerlukan penanganan secara khusus dan tersendiri. Dengan demikian penanganan pasca panen yang baik dan benar akan meningkatkan daya saing dipasar sehingga produk tersebut akan tetap bisa dipertahankan kualitasnya.

4. Pemasaran (Marketing)

Pemasaran hasil produk merupakan hal yang sangat penting dalam sistem agribisnis, tanpa adanya dukungan pasar maka sulit diharapkan adanya kesinambungan usaha. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain menyediakan informasi pasar meliputi kebutuhan pasar, harga, dan jaringan pemasaran, menyelenggarakan temu usaha, pameran, promosi dan upaya-upaya lain dalam rangka mencari pasar baru harus terus menerus dilakukan. Dilain pihak untuk mempertahankan pasar maka kesinambungan produksi juga sangat perlu diperhatikan.

Dalam pemasaran hasil AUK harus dipilih pada kondisi pasar yang paling menguntungkan yaitu dengan melihat kebutuhan pasar. Dengan melihat kebutuhan pasar tersebut maka dapat ditentukan jenis dan bentuk barang yang diproduksi, volume kebutuhan pasar, saat kapan diperlukan.

Kualitas, kuantitas dan kontinuitas suatu produk sangat menentukan harga pasar nantinya, bila ketiga hal tersebut dapat dipertahankan maka tidak akan sulit mendapatkan pasar atau dapat bersaing dipasar bebas sehingga akan banyak pengusaha yang bersedia bekerja sama dengan petani atau membuka usaha di bidang AUK, yang pada gilirannya semua produk AUK akan tersalurkan/laku dipasaran sehingga tidak terjadi penumpukan produk. Dengan demikian petani akan bergairah untuk mengusahakan AUK.

5. Sarana Pendukung (Supporting institution)

Sarana pendukung yang sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha antara lain industri keuangan, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, kebijakan pemerintah.

Dalam hal ini, sub sistem pertama adalah agribisnis on-farm, sedangkan sub sistem dua sampai empat adalah agribisnis off-farm dan sub sistem lima adalah jasa pendukung. Pada agribisnis off-farm terdapat agribisnis hulu (sub sistem dua) dan agribisnis hilir (sub sistem tiga dan empat).

Konsep sistem agribisnis yang demikian berimplikasi pada cara membangun sistem agribisnis. Keunggulan komparatif (comparative advantage) harus ditransformasi melalui serangkaian pembangunan menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage). Transformasi perekonomian dari berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian yang berbasis pada keunggulan bersaing, adalah melalui pengembangan ke empat sub sistem tersebut.

Keunggulan bersaing tidak akan mampu dicapai bila hanya satu sub sistem saja yang berkembang, sementara sub sistem lainnya tidak berkembang. Tingkat berkembangnya secara keseluruhan ditentukan oleh sub sistem dari agribisnis yang paling terbelakang. Oleh karenanya, pengembangan antara sub sistem agribisnis haruslah berjalan secara simultan dan harmoni.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring adalah pemeriksaan secara periodik atas implementasi suatu kegiatan yang telah dijadwalkan dan sedang berjalan. Monitoring pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hasil kegiatan dilapangan. Hasil monitoring tersebut sebagai bahan penyusunan laporan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang akan datang. Monitoring berfungsi untuk memperoleh umpan balik dan mengetahui cara untuk memperbaiki penyimpangan atau kekurangan yang ditemukan dilapangan. Dalam monitoring, informasi dihimpun secara rutin dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan, disepakati dan disetujui. Penyimpangan antara pelaksanaan dengan rencana ditindak lanjuti sebagai koreksi dan sekaligus sebagai masukan guna penyempurnaan kriteria dan standar model aneka usaha kehutanan.

Monitoring dalam pembangunan model aneka usaha kehutanan meliputi aspek produksi, pemasaran, sosial ekonomi dan perkembangan kelembagaan.

1. Monitoring aspek produksi dan pemasaran

Hal - hal yang dimonitor pada kegiatan produksi dan pemasaran antara lain : tanaman pada areal model, baik tanaman pokok maupun tanaman sela (tanaman semusim), perkembangan tanaman, produksi hasil setiap komoditi (teknik pemanenan) dan pemasaran hasil produksi (pasar dan jaringan pemasaran), serta permasalahan yang ditemui dalam setiap tahap kegiatan.

2. Monitoring aspek sosial ekonomi

Monitoring sosial ekonomi diperlukan untuk mengetahui dampak manfaat pembangunan model aneka usaha kehutanan bagi anggota kelompok tani dan masyarakat sekitarnya. Hal-hal yang dimonitor pada

kegiatan sosial ekonomi meliputi keterlibatan keluarga (jumlah KK, jumlah anggota keluarga), penyerapan tenaga kerja, peningkatan sumber daya manusia (kursus, latihan, magang dll), kesempatan berusaha (jenis usaha yang timbul akibat pembangunan model), peningkatan pendapatan, ketersediaan lembaga ekonomi (koperasi, peralatan, perkreditan dll), sarana pemasaran dan permasalahannya.

3. Monitoring kelembagaan

Kesempurnaan kelembagaan akan sangat mendukung keberhasilan kegiatan produksi, pemasaran dan pengembangan usahatani masyarakat. Hal yang dimonitor dalam aspek kelembagaan meliputi organisasi pembinaan, sistem pembinaan, pembentukan dan pembinaan kelompok tani, pengendalian sistem produksi dan pemasaran serta permasalahannya.

B. Evaluasi

Evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan model aneka usaha kehutanan diarahkan pada pencapaian target pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan pada setiap tahapan kegiatan yang direncanakan. Evaluasi dilaksanakan baik yang menyangkut prosedural maupun substansial. Prosedural menyangkut penyusunan, penilaian dan pengesahan rancangan; pengawasan; pembinaan dan pengendalian. Sedangkan substansial menyangkut tahapan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, produksi sampai ke dampak yang terjadi.

C. Pelaporan

Laporan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan suatu kegiatan serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Materi laporan merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang disajikan dalam bentuk tabel, uraian, peta dan lain sebagainya. Dalam laporan juga disajikan permasalahan-permasalahan yang timbul

selama melaksanakan suatu kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

Mekanisme pembuatan laporan dimulai pada tingkat lapangan yang dilaksanakan oleh pelaksana untuk selanjutnya diolah oleh Balai Pengelolaan DAS setempat. Kepala Balai Pengelolaan DAS selanjutnya melaporkan perkembangan areal model aneka usaha kehutanan ke Direktorat Jenderal RLPS secara bulanan, semesteran dan tahunan dengan tembusan kepada Bupati setempat.

Laporan disusun mengikuti kerangka isi sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran

BAB II : METODOLOGI

- A. Pengumpulan data
- B. Analisa data

BAB III : HASIL MONITORING DAN EVALUASI

- A. Perkembangan dan Keberhasilan Fisik Model
- B. Produksi dan Pemasaran
- C. Pengembangan Kelembagaan
- D. Analisa Dampak

BAB IV : PERMASALAHAN

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

LAMPIRAN

BAB VII

PERAN SERTA PARA PIHAK

Pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan model aneka usaha kehutanan adalah sebagai berikut :

A. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

1. Penyusunan pedoman
2. Persetujuan anggaran
3. Monitoring dan evaluasi
4. Pembinaan teknis dan kelembagaan

B. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS)

1. Penyusunan rancangan secara partisipatif dengan kelompok tani
2. Sosialisasi dan koordinasi
3. Menyelenggarakan administrasi dan keuangan
4. Bimbingan teknis dan kelembagaan
5. Monitoring dan pelaporan
6. Memfasilitasi dalam pengadaan bahan serta sarana dan prasarana
7. Memfasilitasi dalam informasi pemasaran hasil
8. Menghimpun data dan informasi terkait kriteria dan standar teknis yang diperoleh dari model aneka usaha kehutanan yang dibangun
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan
10. Memfasilitasi pendampingan

C. Dinas Propinsi yang menangani Kehutanan

1. Pembinaan teknis dan kelembagaan
2. Memfasilitasi dalam pengembangan usaha
3. Membantu memfasilitasi dalam pengembangan usaha
4. Memfasilitasi dalam pemasaran hasil
5. Memfasilitasi dalam penyelenggaraan tata usaha kayu
6. Memfasilitasi penyuluhan

D. Penyuluh Kehutanan Lapangan

1. Melakukan penyuluhan teknis
2. Membantu menyusun Rencana Umum Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
3. Membimbing kelompok tani dalam pembuatan pelaporan
4. Koordinasi dengan pendamping/LSM dalam pelaksanaan pendamping kelompok.
5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan teknis yang dihadapi kelompok tani

E. Pendamping/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. Membimbing kelompok tani dalam bidang kelembagaan
2. Membimbing kelompok tani dalam menyusun Rencana Umum Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
3. Mengadakan kegiatan pemberdayaan kelompok tani
4. Koordinasi dengan penyuluh kehutanan lapangan dalam pelaksanaan pendampingan kelompok.
5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan kelembagaan yang dihadapi kelompok tani.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Pembangunan Model Aneka Usaha Kehutanan yang berisikan antara lain mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kelembagaan usaha, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta peran para pihak dalam pembangunan model aneka usaha kehutanan, disusun untuk dipedomani oleh para pihak terkait dan diharapkan dapat memperlancar dalam pelaksanaan pembangunan model aneka usaha kehutanan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan diterbitkan buku pedoman ini, diharapkan semua pihak terkait dapat berpartisipasi lebih aktif sesuai perannya dalam pembangunan model aneka usaha kehutanan diwilayahnya masing-masing.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14 April 2004

DIREKTUR JENDERAL
REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL

Ttd.

Ir. SOETINO WIBOWO
NIP 0800242174